

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang tumbuh dan berkembang mempunyai tujuan utama yaitu profitabilitas dengan mendapatkan pencitraan dan persepsi yang baik dari para *stakeholders*. Namun, dewasa ini pandangan tersebut bergeser kearah yang lebih kompleks yaitu bagaimana masyarakat sebagai pengguna hasil produksi perusahaan mengakui kredibilitas perusahaan tersebut. Sebab, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan yang keberadaannya tidak lepas darinya. Mengingat hal tersebut maka penting bagi perusahaan untuk turut serta menjaga dan peduli terhadap aspek sosial bagi masyarakat maupun lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Konsep ini kemudian berkembang dengan istilah Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tanggung Jawab Sosial di maksud untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berdampak buruk kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan (Kusuma, et al, 2014). Penggunaan istilah Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) akhir-akhir ini semakin populer dengan semakin meningkatkan praktek tanggung jawab sosial perusahaan, dan diskusi-diskusi global, regional, dan nasional tentang CSR (Hardiansyah, 2008). Menguatnya terpaan prinsip *good corporate governance* seperti *fairness, transparency, accountability*, dan *reponsibility* telah mendorong CSR semakin menyentuh “Jantung hati” dunia bisnis (Suharto, 2008).

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu hal yang harus diterapkan oleh perusahaan sehingga pelaporan tanggung jawab sosial menjadi sebuah kebutuhan untuk memberikan informasi kepada penggunaan laporan keuangan mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya. Laporan tersebut digunakan para pengguna

laporan untuk menilai output dari implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kesejahteraan masyarakat (Hadi, 2011).

Di Indonesia pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan saat ini telah menjadi kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan atas dilaksanakannya tanggung jawab sosial bagi perusahaan. Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan Terbatas untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga setiap perusahaan diharuskan untuk melaksanakan peraturan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi kepada berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) seperti investor, kreditor, karyawan, pelanggan, pemasok, *competitor*, pemerintah, dan masyarakat. Perusahaan skala besar atau kecil yang ada dalam pelaksanaan operasionalnya pasti menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar perusahaan tersebut (Faricha, 2015).

Dengan adanya ketetapan tersebut, kesadaran perusahaan untuk membuat dan mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial semakin meningkat. Tidak hanya perusahaan di sector manufaktur, pertambangan atau pertanian saja yang mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya. Sektor lain seperti perbankan juga turut mengungkapkan usahanya, setiap perusahaan termasuk perbankan memiliki tanggung jawab sosial terhadap komunitas yang berkaitan dengan kegiatan operasional bisnisnya meliputi aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) atau biasa disebut *triple bottom line* (3P), yang di wujudkan dalam bentuk *Corporate Sosial Responsibility*. Akan tetapi, sejak peluncuran ISO 26000 pada awal November 2010 oleh lembaga *International Organization for Standardization* (ISO) mengenai *Guidance on Social Responsibility*, komponen *triple bottom line* ditambah aspek prosedur

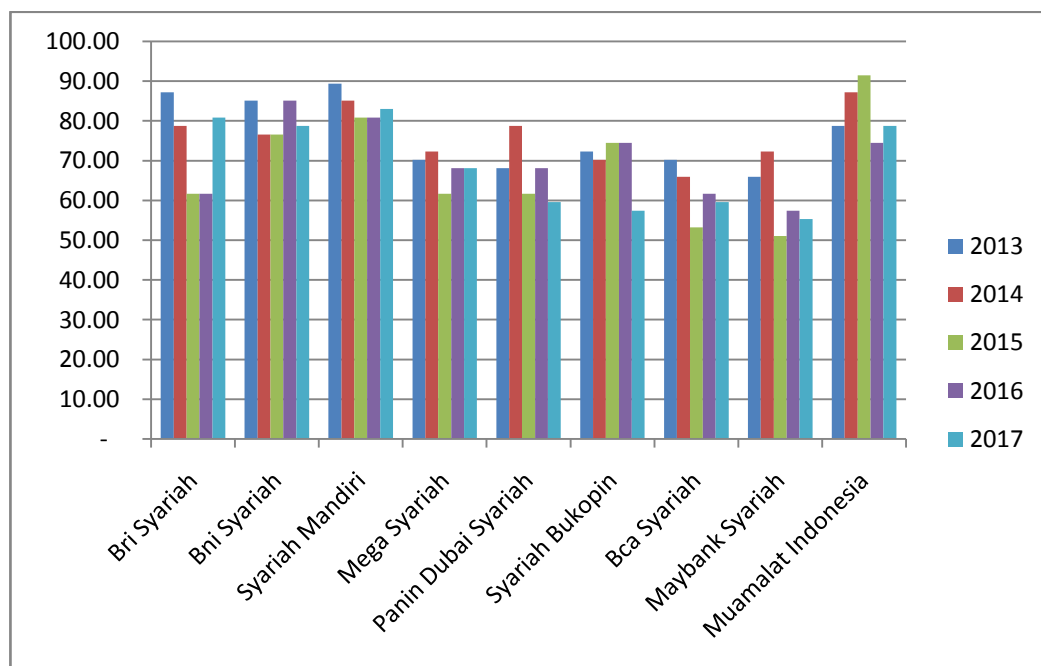
(*procedure*) (Fauziah dan Yudho, 2013). Konsep tanggung jawab sosial yang berkembang juga tidak hanya dilakukan oleh perbankan konvensional saja, akan tetapi juga dilakukan oleh perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan operasionalnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan Islam yaitu tidak melakukan transaksi yang mengandung riba dan kegiatan yang dilarang oleh Islam.

Alasan perusahaan khususnya di bidang perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggung jawaban, dari manajemen ke pemilik saham manajemen kepada seluruh *stakeholders*. Salah satu jenis bank yang memainkan peranan penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bank syariah. Bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak, dimensi spiritual ini tidak hanya menghendaki bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah (Meutia, 2010). Posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah eksis di tingkat nasional maupun internasional harus menjadi lembaga keuangan percontohan dalam menggerakkan program tanggung jawab sosial. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial bank syariah bukan hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari itu bahwa tanggung jawab sosial bank syariah dibangun atas dasar falsafah dan *tasawwur* (gambaran) Islam yang kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat (Yusuf, 2010).

Bagi umat Islam kegiatan bisnis termasuk bisnis perbankan tidak akan pernah terlepas dari ikatan etika syariah. Akuntansi syariah adalah “konsep dimana nilai-nilai Al-Quran harus dijadikan prinsip dasar dalam aplikasi akuntansi”. Tanggung Jawab Sosial dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Quran (Al-Baqarah 205). Teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam bank syariah adalah *Syariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini karena dalam *syariah enterprise theory* memiliki 2 konsep akuntabilitas yaitu akuntabilitas kepada

kepada Allah SWT dan Akuntabilitas kepada masyarakat. Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Gambar 1.1
Perkembangan CSR dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory
pada Bank Umum Syariah tahun 2013-2017



Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata CSR bank syariah setiap tahun mengalami kondisi yang fluktuatif. Terlihat pada tahun 2014 Bank Panin Dubai Syariah mengalami peningkatan sebesar 10,64 , dan tahun selanjutnya mengalami penurunan sebesar 17.02 , tahun selanjutnya bank panin dubai syariah mengalami peningkatan sebesar 6.38, tahun selanjutnya mengalami penurunan sebesar 8.51. Bank BCA Syariah mengalami penurunan sebesar 4.26 , tahun selanjutnya Bank BCA Syariah mengalami penurunan sebesar 12.77 , tahun selanjutnya Bank BCA Syariah mengalami peningkatan sebesar 8.51 , dan tahun selanjutnya mengalami penurunan sebesar 2.13 . Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan sebesar 8.51 , tahun selanjutnya Bank Muamalat Indonesia mengalami

peningkatan sebesar 4.26 , tahun selanjutnya Bank Muamalat mengalami penurunan sebesar 17.02 dan tahun selanjutnya Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan sebesar 4.26 . Salah satu penyebab lemahnya pelaksanaan CSR pada bank syariah adalah karena bahwa CSR adalah sentra biaya (cost center) sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Kompetensi perbankan yang ketat dan orientasi maksimasi keuntungan juga seringkali menyebabkan kecenderungan bank syariah untuk lebih melayani kelompok kuat dan *profitable*. Karenanya, fungsi bank syariah dalam memfasilitasi keterkaitan antara *voluntary sector* dengan pemberdayaan ekonomi marjinal belum optimal (www.pefindobirokredit.com). Dengan demikian perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi CSR sehingga dapat diambil langkah perbaikan kinerja untuk meningkatkan CSR selanjutnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial di antaranya adalah Komisariss Independen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas. Dengan adanya Komisariss Independen di dalam pengungkapan tanggung jawab sosial di harapkan dapat memberikan tekanan pada perusahaan unuk mengungkapkan *sustainability reporting* dalam rangka memastikan keselarasan antara keputusan dan tindakan perusahaan dengan nilai-nilai sosial dan legitimasi perusahaan. Adanya Dewan Pengawas Syariah di dalam perusahaan syariah diharapkan dapat mengawasi kegiatan bank agar dapat sesuai dengan prinsip syariah. Kepemilikan Institusional di dalam pengungkapan tanggung jawab sosial diharapkan dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Dan adanya Profitabilitas di dalam pengungkapan tanggung jawab sosial bisa membuat manajemen bebas dan fleksibel dalam melakukan pengungkapan kepada masyarakat tanpa dipengaruhi oleh bagaimana perolehan asset atau modal, meskipun laba bank syariah yang diperoleh meningkat atau pun menurun, pengungkapan tanggung jawab sosial tetap dilakukan dalam laporan tahunan bahkan seharusnya mengalami peningkatan karena dana yang digunakan untuk melakukan pengungkapan tersebut bukan

hanya berasal dari laba tetapi dapat berasal dari dana *zakat*, pendapatan non-halal, *infak*, sedekah, dan *wakaf* (Mustari, 2016).

Penelitian ini merujuk dari penelitian yang dilakukan Rena 2016. Perbedaan penelitian ini adalah dengan tahun penelitian yang terbaru yaitu tahun 2013 sampai dengan 2017 serta menambah *Syariah Enterprise Theory*. Penelitian ini penting di lakukan karena pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia masih kurang dalam mengungkapkan informasi tanggung jawab sosialnya.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang telah di temukan, maka penelitian ini mengambil judul **“Analisis Faktor Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada Bank Umum Syariah (BUS) yang telah mempublikasikan annual report yang terdaftar di Bank Indonesia untuk tahun 2013 sampai dengan 2017.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di uraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam *Syariah Enterprise Theory*?
2. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam *Syariah Enterprise Theory*?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam *Syariah Enterprise Theory*?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam *Syariah Enterprise Theory*?

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam *Syariah Enterprise Theory*.
2. Untuk menguji secara empiris apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam *Syariah Enterprise Theory*
3. Untuk menguji secara empiris apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam *Syariah Enterprise Theory*
4. Untuk menguji secara empiris apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam *Syariah Enterprise Theory*

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Tanggung Jawab Sosial, Perbankan Syariah, dan *Syariah Enterprise Theory*
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada bank syariah sebagai masukan untuk lebih banyak lagi dilakukannya pengungkapan tindakan-tindakan sosial secara syariah, tata kelola perusahaan, penerapan *syariah enterprise theory* kedalam pengungkapan tanggung jawab sosial.
3. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber terkait dengan topic penelitian, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang berisi mengenai teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan alat analisis yang di gunakan.

Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum yang memberikan penjelasan secara singkat objek yang diteliti, deskripsi data yang menjadi materi untuk di analisis dalam pembahasan.

Bab V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran materi untuk di analisis dalam pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN